

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI
DANA DESA DI KECAMATAN TAMBELANG KABUPATEN
BEKASI PERIODE 2016-2018**

**(Studi Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor 425.K/PID. SUS/2016)**

TESIS

Oleh :

**KATMOJO ATMODARMINTO
NPM : 201720251012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI
DANA DESA DI KECAMATAN TAMBELANG KABUPATEN
BEKASI PERIODE 2016-2018**

**(Studi Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor 425.K/PID. SUS/2016)**

TESIS

Oleh :

**KATMOJO ATMODARMINTO
NPM : 201720251012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Periode 2016 - 2018 (Studi Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016)**

Nama Mahasiswa : Katmojo Atmodarminto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251012

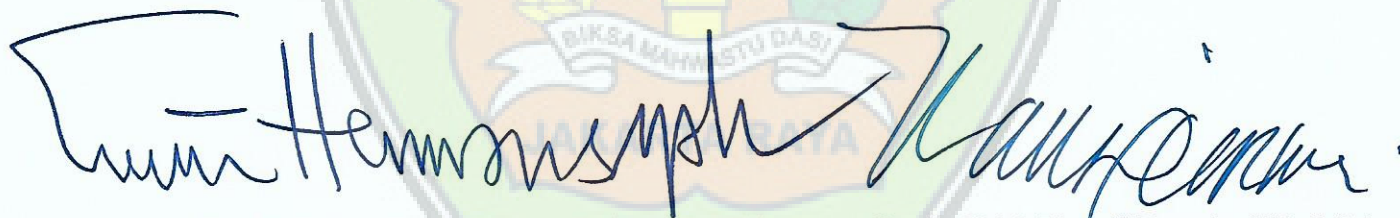
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, 13 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0319046403

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Periode 2016 - 2018 (Studi Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016)**

Nama Mahasiswa : Katmojo Atmodarminto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251012

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 05 April 2019

Jakarta, 15 April 2019

MENGESAHKAN,


Ketua Tim Penguji : **Dr. Hotma P. Sibuea, SH. MH**
NIDN : 0323035802

Penguji I : **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH. MH**
NIDN : 0319046403

Penguji II : **Dr. Dwi Atmoko, SH. MH**
NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

PLH. Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Bhatara Ibnu Reza, SH. M.Si. LL.M..Ph.D
NIDN : 0310127507

Pjs. Dekan
Fakultas Hukum



Bhatara Ibnu Reza, SH. M.Si. LL.M. Ph.D
NIDN : 0310127507

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Periode 2016-2018 (Studi Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

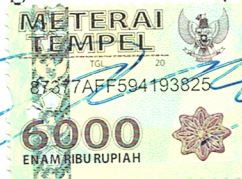
Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 15 April 2019

Yang Membuat Pernyataan,



KATMOJO ATMODARMINTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program pasca sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Tesis ini Peneliti memilih judul: *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Periode 2016-2018 (Studi Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016)”* Peneliti menyadari bahwa materi Tesis ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bhatara Ibnu Reza, SH. M.Si. LL.M. Ph.D. selaku Pjs. Dekan dan PLH. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., Selaku Pembimbing Satu Tesis.
4. Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM. Selaku Pembimbing Dua Tesis.
5. Dosen Fakultas Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.

6. Kedua orang tua saya, Bpk Iro Bin Biye (alm), Ibu Sadiyah (Almh) . Serta Orang Tua saya Bpk Abdul Rohman dan Ibu Siti Napsiah, yang terus memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik
7. Saudara saya, Kakak ku Endat Rodayah, Amk dan Apiatno, SE. M.Si Adik ku Kartono (Alm) yang menjadi motivasi saya
8. Kepada Istriku tercinta Neneng Solihah, SP. M.Si yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.
9. Kepada kedua anakku tercinta Alia Fathia Rahma K, Alfya Hasna Fadillah K, Adilla Hanna Kamilah K, yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.
10. Seluruh Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 18 Tahun 2017 yang telah melalui dua tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, April 2019

KATMOJO ATMODARMINTO

ABSTRAK

KATMOJO ATMODARMINTO, 201720251012, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Periode 2016-2018 (Studi Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016)*, Jumlah Halaman 123, Tahun 2019.

Korupsi seolah sudah merasuki lapisan masyarakat hingga ke tingkat bawah. Dulu hanya pejabat dengan jabatan tinggi yang terlibat korupsi. Tapi dewasa ini korupsi sudah menjamah tingkat kecamatan bahkan tingkat desa. Aparatur desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terbagi menjadi Kepala Desa, serta Perangkat Desa. Dalam praktiknya tidak jarang terdapat Kepala Desa yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, sebagaimana terjadi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016. Tujuan penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Dana Desa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum, baik dari segi administratif maupun dari segi pemidanaan terhadap aparatur desa yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap alokasi dana desa, sejatinya belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tambelang. Masalah penegakan hukum ini sendiri, penulis telusuri karena kurang seriusnya penegak hukum, dalam menanggulangi perkara-perkara yang melibatkan pejabat desa, pihak ketiga seperti perusahaan, maupun adanya hubungan nepotisme dengan pejabat daerah, seperti kasus yang terjadi di wilayah Desa Sukamantri yang melibatkan CV. Pilar Mandiri, yang diduga dimiliki oleh seorang anak dari Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepala Desa, dan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

KATMOJO ATMODARMINTO, 201720251012, Law Enforcement for Corruption of Village Fund Budgets in Tambelang District, Bekasi Regency, Period 2016-2018 (Comparative Study of Villages in Tambelang Subdistrict with Supreme Court Cassation Decision Number 425K / PID. SUS / 2016), Number of Pages 123, Year 2019.

Corruption seems to have penetrated the layers of society to the lower levels. In the past only officials with high positions were involved in corruption. But today corruption has touched the sub-district level and even the village level. The village apparatus in Law Number 6 of 2014 is divided into Village Heads, and Village Devices. In practice it is not uncommon for a Village Head to misuse his position to enrich himself, as happened in the Supreme Court Cassation Decision Number 425K / PID. SUS / 2016. The purpose of this study is to examine and analyze the form of law enforcement against village apparatuses who commit criminal acts of corruption in the Village Fund.

In this study the author uses a normative approach methodology. According to Mukti Fajar ND, empirical legal research has the object of study regarding community behavior. The behavior of the people studied is the behavior that arises due to interacting with the existing norm system. The interaction emerged as a form of community reaction to the implementation of a positive statutory provision and can also be seen from the behavior of the community as a form of action in influencing the formation of a positive legal provision.

The conclusion of this study is that the implementation of law enforcement, both in terms of administration and in terms of the punishment of village apparatuses who commit criminal acts of corruption against village fund allocations, has not actually been implemented properly in Tambelang District. The problem of law enforcement itself, the author explores because of lack of seriousness of law enforcers, in dealing with cases involving village officials, third parties such as companies, as well as nepotism relations with regional officials, such as the case in Sukamantri Village involving CV. Pilar Mandiri, which is allegedly owned by a child from a Member of the Bekasi Regency DPRD.

Key Words : *Law Enforcement, Village Chief, and Corruption Crime*

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
1.4. Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori	8
1.4.1. Teori Kepastian Hukum (Grand Theory)	10
1.4.2. Hukum Pidana (Middle Range Theory)	11
1.4.3. Pidana dan Pemidanaan (Middle Range Theory)	13
1.4.4. Tindak Pidana Korupsi (Applied Theory)	14
1.4.5. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Pengawasan Dana Desa	22
1.5. Metodologi Penelitian	22
1.6. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hukum Pidana	26
2.2. Tujuan Hukum Pidana	28
2.3. Pembagian Hukum Pidana	34

2.4. Teori Kepastian Hukum	35
2.5. Asas Persamaan Kedudukan Hukum	37
2.6. Tindak Pidana Korupsi	39
2.7. Pemerintah Desa	44
BAB III BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN APARATUR DESA YANG MENGELOLA ALOKASI DANA DESA	
3.1. Bentuk Pertanggung jawaban Aparatur Desa Yang Mengelola Alokasi Dana Desa	50
3.2. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Aparatur Desa Terkait Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Atas Alokasi Dana Desa	59
BAB IV BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS ALOKASI DANA DESA	
4.1. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Alokasi Dana Desa	91
4.2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Alokasi Dana Desa	106
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	121
5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Gambaran Umum Aparatur Desa Pada Desa Sukabakti.....	74
Tabel 3.2	Alokasi Dana Desa Sukabakti 2016-2018.....	74
Tabel 3.3	Gambaran Umum Aparatur Desa Pada Desa Sukamaju.....	75
Tabel 3.4	Alokasi Dana Desa Sukamaju 2016-2018.....	75
Tabel 3.5	Gambaran Umum Aparatur Desa Pada Desa Sukamantri.....	76
Tabel 3.6	Alokasi Dana Desa Sukamantri 2016-2018.....	76
Tabel 3.7	Gambaran Umum Aparatur Desa Pada Desa Sukarahayu.....	77
Tabel 3.8	Alokasi Dana Desa Sukarahayu 2016-2018.....	77
Tabel 3.9	Gambaran Umum Aparatur Desa Pada Desa Sukaraja.....	78
Tabel 3.10	Alokasi Dana Desa Sukaraja 2016-2018.....	78
Tabel 3.11	Gambaran Umum Aparatur Desa Pada Desa Sukarapih.....	79
Tabel 3.12	Alokasi Dana Desa Sukarapih 2016-2018.....	79
Tabel 3.13	Gambaran Umum Aparatur Desa Pada Desa Sukawijaya.....	80
Tabel 3.14	Alokasi Dana Desa Sukawijaya 2016-2018.....	80
Tabel 4.1	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Desa Terkait Penggunaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Bentuk Sanksi Yang Dikenakan, Di Wilayah Kecamatan Tambelang.....	102
Tabel 4.2	Bentuk Transpransi Aparatur Desa terkait ADD.....	113
Tabel 4.3	Bentuk Isi Transpransi Aparatur Desa terkait ADD.....	114
Tabel 4.4	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Desa Terkait Penggunaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Jabatan Di Wilayah Kecamatan Tambelang.....	115

DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
ACC	<i>Anti Corruption Committe</i>
ADD	Alokasi Dana Desa
APBN	Anggaran Perencanaan Belanja Negara
BPHN	Badan Pertimbangan Hukum Nasional
BPD	Badan Pemberdayaan Desa
CV	<i>Commanditaire Vennootschap</i> atau Persekutuan Komanditer
HAM	Hak Asasi Manusia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PEMDA	Pemerintah Daerah
PEM PROV	Pemerintah Desa
PERMENDES	Peraturan Menteri Desa
PN	Pengadilan Negeri
PN. BDG	Pengadilan Negeri Bandung
PN. SMG	Pengadilan Negeri Semarang
PT	Perseroan Terbatas
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945